

Ringkasan

Tindak Pidana Narkotika di Indonesia masih merupakan masalah yang kompleks, hal tersebut dapat dilihat dengan rumitnya melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, penegakan hukum telah dilakukan dengan optimal untuk memberi efek jera kepada pelaku kejahatan Narkotika akan tetapi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika terus terjadi, sebenarnya apa yang menjadi permasalahannya, dianalisis dari penerapan pidananya, bahwa mayoritas pelaku tindak pidana narkotika divonis dengan pasal 112 ayat 1 atau Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam beberapa perkara, hakim memvonis pelaku narkotika dengan Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika akan tetapi Pidanaannya dibawah dari ketentuan sebagaimana UU Narkotika tersebut.

Tujuan penulisan tesis ini untuk meneliti bagaimana cara penegak hukum melakukan analisis hukum untuk menerapkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan menganalisis apakah dengan pidanaaan dapat menekan jumlah pelaku tindak pidana Narkotika tersebut diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penelitian tesis ini menggunakan penelitian metode Yuridis Empiris, yang berarti penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana pelaksanaan undang-undang dilapangan yang dilaksanakan dan diterapkan oleh Penegak Hukum dikaitkan dengan penerapan pidanaannya yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana Narkotika karena dalam pelaksanaannya ternyata ada hukuman yang di terapkan oleh Majelis Hakim terkait pidanaannya tidak sesuai ancaman minimal pada pasal yang diterapkan.

Hasil penelitian tulisan ini menunjukkan bahwa pidanaaan yang diterapkan oleh pengadilan mengenai pidanaaan terhadap pelaku pidana narkoba seharusnya mengacu kepada ketentuan pidanaaan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang namun Pidanaaan merupakan kewenangan Pengadilan.

Kesimpulan mengenai tesis ini, bahwa pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika sangat dipengaruhi oleh alat bukti yang ditemukan dipersidangan dan keyakinan hakim, sekalipun masing masing instansi memiliki aturan dalam hal Pasal pidanaannya dan saran peneliti hendaknya aturan di Kejaksaan maupun di Pengadilan dapat dijadikan satu kesepakatan supaya tidak terjadi perbedaan dalam penerapan pidanaannya dan untuk menekan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika agar penegak hukum khususnya Kejaksaan dapat terus dengan gencar melakukan sosialisasi tentang dampak buruk Narkotika termasuk sosialisasi mengenai ancaman hukuman untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika.

Kata Kunci : Analisis hukum, Tindak Pidana Narkotika.